

Relevansi Industri Pertahanan Domestik Dalam Penguatan Diplomasi Pertahanan Indonesia

R. Mokhammad Luthfi

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Al Azhar Indonesia, Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12110

Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian FISIP UAI

luthfi@uai.ac.id

Abstrak

Industri pertahanan yang dikembangkan dalam negeri tetap relevan untuk memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia. Bila suatu negara dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan alutsista (alat utama dan sistem persenjataan) untuk keperluan pertahanannya, maka negara itu akan relatif bebas dari pengaruh-pengaruh asing (negara maju pemasok alutsista) dalam membuat kebijakan luar negeri. Hal ini seperti yang dinyatakan Bitzinger bahwa ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri akan memberikan peluang negara pemasok senjata, untuk memaksa negara pembeli dalam konsesi mengenai isu-isu nasional seperti hak asasi manusia (HAM), atau isu-isu internasional seperti terorisme, perdagangan obat terlarang, dan lain-lain. Oleh karena itu, industri pertahanan domestik memegang peranan yang vital dalam mengamankan kepentingan nasional, dan perlu dipertahankan untuk memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia. Tulisan ini mencoba menyampaikan argumentasi dan analisis mengapa negara Indonesia tetap perlu mempertahankan keberadaan industri pertahanan domestiknya dan bagaimana hal tersebut dapat memperkuat diplomasi Indonesia khususnya dalam *defence diplomacy*.

Kata kunci: Diplomasi, Industri Pertahanan, Alutsista, *Defence Diplomacy*

Pengalaman Embargo

Indonesia pernah merasakan pengalaman pahitnya bergantung kepada senjata impor tatkala diberlakukannya pembatasan (*restrictions*) senjata pada tahun 1991, dan embargo senjata termasuk suku cadang dan perawatan pesawat tempur F-16 *Fighting Falcon* oleh Amerika Serikat (AS) pada tahun 1999.¹ Embargo ini terjadi karena Indonesia dianggap bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Timor-Timur (Timor Leste sekarang).

Embargo menyebabkan kesiapan skuadron pesawat tempur menurun dan secara langsung akan menurunkan kesiapan pertahanan dan keamanan terdepan yang diemban oleh Tentara Nasional Indonesia. Embargo, pembatasan pemeliharaan, merupakan sanksi yang

rentan diterima dan selalu merupakan risiko bagi sebuah negara yang mengandalkan alutsista impor. Kondisi ini, secara lebih luas menurunkan kapabilitas pertahanan Indonesia.

Meskipun pada bulan Februari, Mei, dan November 2005 AS berturut-turut mencabut pembatasan-pembatasan dan embargo tersebut², pengalaman ini tentu membekas pada Pemerintah Indonesia. Kini, menurut Jaleswari Pramordhawardhani, Indonesia kemudian mendiversifikasi pembelian alutsista kepada negara-negara selain AS. Tercatat, Indonesia mengalihkan pembelian ke Rusia, China, Korea Selatan³. Pembelian senjata dari luar negeri memang tak bisa dihindari terutama terhadap peralatan yang belum dapat diproduksi industri domestik.

Pembelian senjata dari luar negeri sendiri merupakan salah satu aktivitas dalam diplomasi pertahanan. Menurut Saroj Bishoyi dari Institute for Defense and Analysis (IDSA) India⁴, menyatakan bahwa perdagangan peralatan pertahanan (*defence trade*) antar negara akan memperkuat hubungan pertahanan negara-negara tersebut. Mengambil contoh antara India dan Amerika Serikat, penguatan hubungan tersebut dimungkinkan karena dalam pembelian peralatan pertahanan, seringkali diiringi kerjasama antara militer negara pembeli dengan militer negara penjual dalam hal pendidikan dan pelatihan. Selain itu, kerjasama juga terjadi pada industri pertahanan kedua negara, terutama pembelian peralatan pertahanan melalui skema alih teknologi dan produksi bersama.

Dari pengalaman embargo ini, Indonesia harus melakukan inovasi dalam sistem pembelian senjata. Pembelian senjata yang biasanya sepenuhnya dari luar negeri, kini selalu diusahakan agar pembelian alutsista diarahkan kepada industri dalam negeri. Secara ekonomi, kebijakan ini perlahan dapat membuat industri pertahanan berkembang dan memutar roda ekonomi di tingkat domestik⁵. Stimulasi ini kemudian akan memiliki efek rambat kepada berkembangnya industri lain, karena industri pertahanan berhubungan dengan industri lain, sebagai contoh, industri baja, elektronik, dan mesin.

Kerjasama Industri Pertahanan

Dalam pelaksanaannya, industri pertahanan Indonesia tidak bisa melakukannya benar-benar mandiri. Tertinggalnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peralatan, dan minimnya komitmen dalam penelitian dan pengembangan (R&D) membuat industri pertahanan domestik harus melakukan kerjasama dengan industri sejenis di luar negeri yang telah maju. Contohnya adalah Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN, kini PT DI) yang bekerjasama dengan CASA Spanyol dalam pembuatan pesawat NC-212 dan CN-235 sejak tahun 1974⁶. Contoh lainnya adalah kerjasama PT PAL, produsen kapal laut dan kapal perang

yang belum lama bekerjasama dengan Daewoo International Corporation dari Korea Selatan untuk pembuatan empat kapal perang jenis LPD (Landing Platform Dock). Empat kapal perang tersebut diproduksi dengan skema alih teknologi dimana dua diproduksi di Korea Selatan dan dua di Indonesia.

Kerjasama industri pertahanan antar negara seperti yang dicontohkan dalam paragraf di atas, adalah salah satu bentuk aktivitas kerjasama pertahanan (*defence cooperation*), bahkan menurut Saroj Bishoyi kerjasama pertahanan merupakan istilah yang tepat untuk menggambarkan diplomasi pertahanan⁷. Dengan demikian menguatnya kerjasama industri pertahanan Indonesia dengan industri pertahanan negara lain, akan menguat pula diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia. Hal ini disebabkan jangka waktu kerjasama yang cukup panjang dan intensifnya implementasi kerjasama dalam industri pertahanan, pertukaran tenaga ahli peralatan pertahanan kedua negara, bertemunya personel militer kedua negara, akan semakin menguatkan hubungan antar negara. Dengan demikian, kerjasama industri pertahanan memegang peran yang penting dalam diplomasi pertahanan Indonesia.

Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, Indonesia telah melakukan kerjasama dengan berbagai negara dalam penyediaan alutsista dan industri pertahanan antara lain dengan RRC, Korea Selatan, Jepang, Rusia, dan Uni Eropa.⁸ Kerjasama pertahanan ini menunjukkan adanya aktivitas diplomasi pertahanan antara Indonesia dan negara-negara tersebut.

Bentuk Kerjasama Industri Pertahanan

Terdapat beberapa bentuk kerjasama industri pertahanan antar negara yang dapat dilakukan. Bitzinger menyatakan bahwa bentuk kerjasama dapat dilakukan dengan cara globalisasi yaitu memperluas partisipasi aktivitas senjata di kancah internasional. Bentuk aktivitas kerjasama ini antara lain: produksi bersama (*co-produce atau co-develop*), mendirikan perusahaan ventura bersama (*joint venture*), dan kerjasama merger dan akuisisi lintas negara.⁹ Sedangkan Saroj Bishoyi mengemukakan bahwa kerjasama industri pertahanan dapat terjadi dengan cara alih teknologi (*dual use technology transfer*), penelitian dan pengembangan bersama (*joint research and development*), produksi bersama (*joint production*), dan memasarkan bersama (*joint marketing*)¹⁰.

Bentuk-bentuk kerjasama industri pertahanan tersebut dilakukan Indonesia. Bahkan, kini setiap pembelian peralatan pertahanan yang belum bisa dibuat oleh industri dalam negeri, akan disyaratkan dengan alih teknologi. Hal ini sejalan dengan rencana pembelian kapal selam untuk TNI AL. Indonesia menginginkan agar kapal selam yang dibeli, dapat juga diproduksi

di Indonesia dengan cara alih teknologi. Indonesia juga akan terlibat dalam pengembangan bersama pesawat tempur KFX dengan Korea Selatan dari mulai opsi keuangan sampai dengan opsi teknis¹¹. Pesawat tempur ini dinilai akan melebihi kemampuan pesawat tempur F-16 Fighting Falcon yang dimiliki Indonesia saat ini. Jika pada tahun 2020 target kerjasama pesawat tempur itu tercapai, keberhasilan ini dapat membuat kapabilitas industri dan pertahanan Indonesia meningkat pesat.

Pencapaian Industri Pertahanan Domestik

Salah satu keberhasilan dalam kerjasama industri pertahanan adalah kerjasama antara IPTN dan CASA Spanyol untuk memproduksi CN-235. Pesawat hasil pengembangan bersama ini kini telah diproduksi sebanyak 230 pesawat dan telah digunakan angkatan bersenjata, maskapai penerbangan, dan penjaga pantai di berbagai dunia¹². Korea Selatan, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Uni Emirat Arab merupakan negara yang telah membeli CN-235 dari Indonesia. Contoh sukses lain dari kerjasama industri pertahanan Indonesia dengan negara lain adalah keberadaan panser APS-3 Anoa. Panser yang didesain asli oleh PT Pindad dan bekerjasama dengan Renault Prancis untuk penyediaan mesin dan transmisi, diminati oleh beberapa negara lain selain juga digunakan oleh TNI Angkatan Darat. Diberitakan bahwa Malaysia tertarik untuk mengakuisisi sampai dengan 30 unit panser untuk pasukan penjaga perdamaian (Malbatt) di Lebanon¹³. Bagi Indonesia sendiri, selain 154 unit panser APS-3 yang dimiliki, saat ini 13 panser tersebut juga dikirim untuk melengkapi kehadiran pasukan penjaga perdamaian Indonesia di Lebanon¹⁴. Selain Malaysia, Bangladesh dan Nepal juga tertarik untuk membeli panser tersebut bagi angkatan bersenjata¹⁵.

Keberadaan panser APS-3 Anoa dalam pasukan penjaga perdamaian Indonesia di Lebanon, merupakan salah satu pencapaian penting dalam diplomasi pertahanan Indonesia. Panser tersebut mewakili salah satu bukti keberhasilan Indonesia dalam upayanya memproduksi peralatan pertahanan secara mandiri. Meskipun panser tersebut bukan berada pada level teknologi yang amat canggih, namun pencapaian ini perlu diapresiasi, terlebih ia memiliki potensi ekonomis untuk di akuisisi negara lain, serta potensi politik akan pengakuan bahwa Indonesia tetap memiliki industri pertahanan yang tidak bisa dianggap remeh.

Kebangkitan industri pertahanan domestik juga dialami oleh PT PAL yang memproduksi kapal laut niaga dan kapal perang. Sukses dengan pembuatan dua LPD yang diproduksi di galangan sendiri di Surabaya sebagai bagian dari empat pesanan LPD dari TNI AL, PT PAL kini juga mendapatkan ketertarikan dari Filipina untuk pembelian tiga kapal LPD, sedangkan dari Timor Leste untuk pembelian dua kapal patroli.¹⁶ Menariknya, pesanan dari

Timor Leste ini diminta dalam bentuk kredit ekspor dari Indonesia. Bagi Indonesia, pemesanan peralatan pertahanan tentu akan membuat menguatnya hubungan kerjasama antar negara secara politik dan ekonomi.

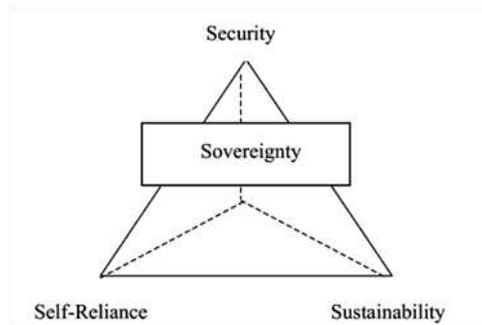
Selain badan usaha milik negara strategis seperti PT DI, PT Pindad, dan PT PAL yang disebutkan di atas, industri pertahanan swasta non-senjata dari Indonesia pun telah diakui oleh dunia internasional. PT Sritex dari Solo, merupakan perusahaan garmen yang produksi kainnya telah digunakan sebagai seragam tempur bagi negara-negara NATO seperti Jerman. Produksinya kini digunakan oleh 16 negara di dunia.¹⁷ Prestasi oleh industri swasta ini sangat membanggakan mengingat produknya dikenal dan diakui oleh negara-negara di dunia.

Meskipun belum dapat disejajarkan dengan negara-negara maju, industri pertahanan domestik tetap dapat memperkuat kapabilitas pertahanan Indonesia. Terbukti dengan beberapa produk yang telah operasional, bahkan dapat digunakan oleh pasukan pemeliharaan perdamaian di luar negeri oleh TNI. Komitmen terhadap kemandirian perlu terus diwujudkan dalam akuisisi peralatan pertahanan dari luar negeri. Dengan demikian upaya alih teknologi, produksi bersama, dan bentuk kerjasama lainnya adalah upaya yang tepat untuk menyiasati ketertinggalan pada industri pertahanan domestik sekaligus bermanfaat untuk memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia karena menguatnya hubungan antar industri pertahanan diberbagai negara.

Memperkuat Diplomasi Pertahanan Indonesia

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa industri pertahanan Indonesia memegang peranan dalam peningkatan kapabilitas pertahanan Indonesia. Kapabilitas yang cukup, akan berpengaruh terhadap upaya penguatan diplomasi pertahanan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Kapabilitas pertahanan ini akan lebih baik apabila diperkuat dengan alutsista yang berasal dari industri pertahanan dalam negeri. Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, hal ini dimaksudkan agar kepentingan nasional Indonesia memiliki kedaulatan, bebas dari tekanan politik negara manapun, yang dapat berakibat pada kemungkinan terkena embargo atau pembatasan-pembatasan terhadap peralatan tertentu yang menghambat pembangunan dan pemeliharaan sarana pertahanan.¹⁸

Ron Matthew dan Curie Maharani menggambarkan kedaulatan negara dalam hubungannya dengan kemandirian dengan segitiga besi kedaulatan nasional (*the iron-triangle of national sovereignty*)¹⁹



Gambar 1. *The Iron-triangle of National Sovereignty*

Menurut Ron Michael dan Curie Maharani, bagi negara berkembang (seperti Indonesia) pertahanan menjadi prioritas untuk mempertahankan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Selain itu, untuk menikmati dan mengisi kemerdekaan, negara harus melakukan pembangunan yang menggantungkan kepada kemampuan sendiri (*self reliance*) secara berkelanjutan (*sustainable*). Ketiga hal itulah yang akan mempengaruhi kepada kedaulatan.

Menurut penulis, kedaulatan ini harus harus terwujud pada tiga kategori kepentingan nasional.²⁰ Pertama, pada kepentingan nasional yang mutlak, yaitu kepentingan atas tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kepentingan nasional ini maka diplomasi pertahanan diarahkan kepada mendukung fungsi pertahanan dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Kedua, kepentingan nasional yang vital, yaitu kepentingan yang menyangkut pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, sejahtera, adil dan makmur, serta demokratis. Dalam kepentingan nasional ini, diplomasi pertahanan dapat diarahkan kepada upaya pencegahan konflik, pencegahan konflik bereskalasi ke luar negeri, dan penyelesaian konflik. Ketiga, kepentingan nasional yang bersifat penting, yaitu kepentingan yang terkait dengan perdamaian dunia dan stabilitas regional. Diplomasi pertahanan dapat diarahkan kepada peran aktif bersama-sama dengan negara lain dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Dengan tiga kategori kepentingan nasional ini, implementasi diplomasi pertahanan Indonesia merupakan tugas yang tidak ringan. Terdapat banyak tantangan dalam mencapai tujuan sesuai kepentingan nasional tersebut. Salah satu tantangan tersebut adalah kapabilitas pertahanan yang perlu terus ditingkatkan ditengah anggaran pertahanan yang masih jauh dari memenuhi *minimum essential force* (MEF) serta diantara peningkatan kapabilitas pertahanan di kawasan. Untuk itulah, perlu adanya komitmen untuk membangun kapabilitas pertahanan

sesuai dengan kebutuhan minimal yang benar-benar harus dipenuhi agar tujuan dari kepentingan nasional tersebut dapat tercapai.

Perhatian dan kepedulian juga harus diberikan kepada industri pertahanan domestik, penelitian dan pengembangan yang mendukung industri pertahanan, dan investasi terhadap keberadaan industri dan penelitian sarana pertahanan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar kapabilitas pertahanan Indonesia tidak bergantung kepada pasokan dari luar negeri yang malah sangat mungkin akan mengorbankan dan membahayakan kepentingan nasional. Selain itu, menurut Ron Matthews dan Currie Maharani²¹, kepemilikan akan militer yang kuat oleh suatu negara merupakan simbol dari kekuatan nasional, dan akan meningkatkan profil negara di tingkat internasional dan lebih jauh, kepada status dari pemerintahnya. Dengan demikian, industri pertahanan domestik beserta dengan kegiatan penelitian dan pengembangan yang mendukungnya, masih tetap relevan dan perlu terus ditingkatkan demi memperkuat diplomasi pertahanan dalam upayanya menjaga dan mencapai tujuan kepentingan nasional Indonesia.

¹ Dalam Tempo Interaktif, Kamis, 11 November 2010, dapat dilihat pada <http://www.tempointeraktif.com/hg/kesra/2010/11/11/brk,20101111-291148,id.html> diakses 4/5/11

² http://www.armscontrol.org/act/2006_01-02/JANFEB-Indonesia diakses 4/5/11

³ Dapat dilihat pada artikel di <http://pmb.lipi.go.id/admin/artikel-print.php?mode=tampil&id=43> diakses 4/5/11

⁴ Saroj Bishoyi. 2011. *Defence Diplomacy in US-India Strategic Relationship*. Journal of Defence Studies. Vol 5. No 1. January 2011. Hal. 68. Bisa dilihat di http://www.idsa.in/system/files/jds_5_1_sbishoyi.pdf diakses 6/4/11

⁵ Jaleswari Pramordhawardhani. Dapat dilihat pada <http://pmb.lipi.go.id/admin/artikel-print.php?mode=tampil&id=43> diakses 4/5/11

⁶ <http://www.antaraneews.com/berita/247301/pt-di-gandeng-eads-casa-produksi-pesawat-c295>

⁷ Saroj Bishoyi. Op.cit. Hal. 66.

⁸ Buku Putih Pertahanan Indonesia. 2008. Kementerian Pertahanan RI.

⁹ Bitzinger, Richard A. 2003. *Chapter 2: Transition and Readjustment in Second-Tier Defence Industries: Five Case Studies*. Adelphi Papers. Hal. 40

¹⁰ Saroj Bishoyi. Op.cit. hal. 69-71

¹¹ Dapat dilihat pada berita <http://koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=73590> tanggal 24 Januari 2011. Diakses pada 6/4/11

¹² Informasi ini dapat dilihat pada <http://www.naval-technology.com/projects/cn235mp/> diakses 6/4/11

¹³ <http://www.mmail.com.my/content/30948-indonesianmade-armoured-vehicles-malaysias-un-mission-lebanon> diakses 6/4/11

¹⁴ <http://metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/04/09/14796/Panser-Anoa-Tiba-di-Lebanon> diakses 6/4/11

¹⁵ <http://www.depkominfo.go.id/2009/02/27/pindad-pertimbangkan-pesanan-panser-dari-nepal/> diakses 6/4/11

¹⁶ <http://koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=78421> diakses 6/4/11

¹⁷ <http://www.sritex.co.id/eng/behind/index.php> diakses 6/4/11

¹⁸ Buku Putih Pertahanan Indonesia. Op.cit. Hal. 157

¹⁹ Matthew, Ron dan Maharani, Curie. 2009. *The Defense Iron Triangle Revisited*. Hal. 40. Dalam Richard A. Bitzinger (ed). *The Modern Defense Industry : Political, Economic, and Technological Issues*. California: Greenwood Publishing Group

²⁰ Ibid. Hal 39-42.

²⁰ Matthew, Ron dan Maharani, Curie. Op.cit. 41

DAFTAR PUSTAKA

Bitzinger, Richard A. 2003. *Chapter 1: The Rise and Fall of Second Tier Arms Producers*. Adelphi Papers. 43: 356

_____. 2003. *Chapter 2: Transition and Readjustment in Second-Tier Defence Industries: Five Case Studies*. Adelphi Papers. 43: 356

Buku Putih Pertahanan Indonesia. 2008. Kementerian Pertahanan RI.

Cottey, Andrew dan Forster, Anthony. 2004. *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. Adelphi Papers, 44: 365

Matthew, Ron dan Maharani, Curie. 2009. *The Defense Iron Triangle Revisited*. Dalam Richard A. Bitzinger (ed). *The Modern Defense Industry : Political, Economic, and Technological Issues*. California: Green wood Publishing Group

Saroj Bishoyi. 2011. *Defence Diplomacy in US-India Strategic Relationship*. Journal of Defence Studies. Vol 5. No 1. January 2011. Hal. 68. Bisa dilihat di http://www.idsa.in/system/files/jds_5_1_sbishoyi.pdf diakses 6/4/11